

PERAN INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN (IMP/SUB-IMP) DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN PEKERJA KB DI KOTA KUPANG

Yunita Huberta Siska Henukh¹, Desantri Tamonob², Maria Yunita Tael³, Lasarus Jehamat⁴, Imelda Nahak⁵, Khairunnisa⁶

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
Email : siskahenukh23@gmail.com, desantritamonob25@gmail.com, taelyunita@gmail.com,
jehamat.lasarus@yahoo.co.id, imelda_nahak@staf.undana.ac.id,
khairunnisa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kependudukan di Indonesia, khususnya tingginya laju pertumbuhan penduduk, menuntut penguatan pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) hingga tingkat akar rumput. Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP dan Sub-IMP), khususnya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD), memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis IMP/Sub-IMP dalam meningkatkan capaian Program KB di Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta analisis data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) selama periode 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran IMP/Sub-IMP terwujud melalui enam fungsi utama, yaitu pengorganisasian yang terstruktur, pertemuan rutin sebagai sarana koordinasi, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling, pencatatan dan pendataan berbasis SIGA, fasilitasi pelayanan KB, serta penguatan kemandirian masyarakat. Capaian peserta KB baru mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023-2024, yang mencerminkan efektivitas peran kelembagaan masyarakat, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2025. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi pria, serta pengaruh faktor sosial budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas dan dukungan terhadap IMP/Sub-IMP menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan Program KB di wilayah perkotaan.

Kata kunci: Institusi Masyarakat Perkotaan, Program Keluarga Berencana, PPKBD, Partisipasi Masyarakat, Kota Kupang

ABSTRACT

Population growth remains a major challenge in Indonesia, requiring the strengthening of Family Planning (FP) programs at the community level. Urban Community Institutions (IMP and Sub-IMP), particularly Village/Sub-district Family Planning Assistants (PPKBD), play a strategic role in bridging government

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.443

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

policies and community participation. This study aims to analyze the strategic role of IMP/Sub-IMP in improving the achievement of the Family Planning Program in Kupang City. A mixed-methods approach with a descriptive-analytical design was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and analysis of Family Information System (SIGA) data from 2023 to 2025. The results indicate that the role of IMP/Sub-IMP is manifested through six main functions: structured organization, routine meetings for coordination, implementation of communication, information, and education (CIE) and counseling, systematic recording and data management based on SIGA, facilitation of family planning services, and strengthening community self-reliance. The number of new FP participants increased significantly during 2023-2024, reflecting the effectiveness of community institutional roles, although fluctuations occurred in 2025. Key challenges include limited infrastructure, low male participation, and socio-cultural influences. The study concludes that strengthening the capacity and institutional support for IMP/Sub-IMP is essential to ensure the effectiveness and sustainability of family planning programs in urban areas.

Keywords: *Urban Community Institutions, Family Planning Program, PPKBD, Community Participation, Kupang City*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan kependudukan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingginya tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan turunan, antara lain tekanan terhadap ketersediaan sumber daya alam, meningkatnya beban infrastruktur, permasalahan lingkungan, serta tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia sejak akhir dekade 1960-an mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai kebijakan strategis dalam pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk.

Program Keluarga Berencana merupakan upaya pembatasan jumlah kelahiran, yang secara normatif mendorong setiap keluarga untuk memiliki dua anak. Program ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dan bahkan diakui keberhasilannya di tingkat internasional. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka partisipasi ber-KB meningkat secara konsisten, dari 26% pada tahun 1980 menjadi 50% pada tahun 1991, dan mencapai 57% pada tahun 1997 (BKKBN, 1997). Keberhasilan ini turut tercermin dalam penurunan indikator demografis nasional, seperti tingkat kelahiran kasar (Crude Birth Rate) yang menurun menjadi sekitar 28-29 per 1.000 penduduk serta Total Fertility Rate (TFR) yang berkisar antara 3,4-3,6 berdasarkan Survei Prevalensi Indonesia (SPI) tahun 1987 (Depkes RI, 1998).

Secara historis, pertumbuhan penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dalam rentang waktu 1800-1900, jumlah penduduk Indonesia meningkat hingga tiga kali lipat. Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada periode 1900-2000, ketika jumlah penduduk bertambah lima kali lipat, dari 40,2 juta jiwa menjadi 205,8 juta jiwa. Dalam kurun

waktu tersebut, Program Keluarga Berencana diperkirakan berhasil mencegah kelahiran sekitar 80 juta jiwa (BKKBN, 2000). Tanpa adanya program KB, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 diproyeksikan mencapai 285 juta jiwa (BKKBN, 2001).

Program KB memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan daya dukung sumber daya yang tersedia. Selain mencegah kepadatan penduduk yang berlebihan, program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pemenuhan gizi, pendidikan, dan perhatian yang optimal kepada setiap anggota keluarga (Yanti, 2021). Dari perspektif ekonomi, keluarga kecil cenderung lebih stabil secara finansial dan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Lebih lanjut, Program KB juga berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pengaturan jarak dan jumlah kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk merencanakan kehamilan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan (Depkes RI, 1998). Program ini juga membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam dunia kerja, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender (Depkes RI, 1998).

Meskipun demikian, implementasi Program KB tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk faktor sosial, budaya, dan agama. Dalam perspektif tertentu, khususnya di kalangan masyarakat Muslim, Program KB masih dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama oleh sebagian kelompok (Yanti, 2021). Pandangan budaya seperti “banyak anak banyak rezeki” serta rendahnya pemahaman mengenai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Kupang. Secara umum, Kota Kupang menunjukkan capaian yang relatif baik dalam pengendalian angka kelahiran dengan TFR sekitar 2,43, yang mendekati angka ideal. Fokus utama program KB di wilayah ini adalah peningkatan cakupan Peserta KB Aktif serta mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode konvensional seperti pil dan suntik. Selain itu, pelayanan KB di tempat kerja telah dikembangkan untuk mempermudah akses bagi kelompok pekerja (Dinas Kesehatan Kota Kupang, 2023).

Namun, pelaksanaan program KB di Kota Kupang masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya partisipasi pria sebagai akseptor KB, masih kuatnya mitos dan kekhawatiran terkait penggunaan kontrasepsi, keterbatasan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah (Yanti, 2021; Dinas Kesehatan Kota Kupang, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran institusi masyarakat perkotaan (IMP dan sub-IMP) dalam meningkatkan capaian pekerja KB di Kota Kupang. Peran institusi masyarakat menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam mengatasi hambatan sosial budaya, meningkatkan kesadaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Program Keluarga Berencana. Dengan optimalisasi peran institusi masyarakat perkotaan, diharapkan capaian program KB dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi terhadap terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Kupang.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di wilayah institusi masyarakat perkotaan (IMP) Kota Kupang, dengan lokasi sasaran meliputi Kelurahan Oebufu, Nefonaek, Manutpen, Fatu Luli, dan Oesapa. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan tingkat kepadatan penduduk, dinamika sosial masyarakat perkotaan, serta kebutuhan penguatan peran institusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB).

Pelaksanaan PKM menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, permasalahan, serta capaian program KB di wilayah sasaran. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Oktober, dengan dukungan monitoring berkelanjutan melalui laporan rutin Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Pendekatan utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi langsung (tatap muka) kepada masyarakat berumah tangga. Sosialisasi dilakukan secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana, khususnya terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode ini dipilih karena dinilai efektif dalam membangun komunikasi dua arah dan menjawab secara langsung berbagai kekhawatiran, mitos, serta hambatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, kegiatan PKM ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu metode partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan keberlanjutan program.

Pendekatan Community Based Research (CBR) juga digunakan untuk memperkuat basis riset pengabdian. Dalam CBR, warga dilibatkan secara aktif sebagai sumber data sekaligus pelaku perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang kontekstual dan berbasis pengalaman langsung masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

Untuk mendukung proses pemberdayaan, kegiatan PKM ini juga mengadopsi pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi dan pengembangan aset serta potensi yang dimiliki masyarakat, baik berupa sumber daya manusia, kelembagaan lokal, maupun jejaring sosial. Dengan berfokus pada kekuatan komunitas, diharapkan masyarakat mampu berperan secara mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan Program KB.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus institusi masyarakat perkotaan, kader KB, PLKB, serta masyarakat sasaran, dan dokumentasi. Data kuantitatif diperoleh dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang diinput secara rutin setiap bulan oleh PLKB. Data SIGA dimanfaatkan sebagai dasar monitoring dan evaluasi capaian program, khususnya dalam melihat perkembangan jumlah peserta KB aktif dan penggunaan metode kontrasepsi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengintegrasikan temuan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan data kuantitatif dari SIGA dianalisis untuk melihat tren dan perubahan capaian program KB sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kegiatan serta rekomendasi penguatan peran

institusi masyarakat perkotaan dalam mendukung keberlanjutan Program Keluarga Berencana di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/Sub-IMP) dalam Peningkatan Capaian Program Keluarga Berencana di Kota Kupang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP dan Sub-IMP), khususnya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD), dalam meningkatkan capaian Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran IMP/Sub-IMP terejawantahkan melalui enam aspek utama, yaitu pengorganisasian, pertemuan, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling, pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan KB, serta penguatan kemandirian masyarakat. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dan secara kolektif berkontribusi terhadap peningkatan capaian peserta KB di wilayah penelitian.

Peran Pengorganisasian IMP/Sub-IMP dalam Pelaksanaan Program KB

Pengorganisasian merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi PPKBD di Kota Kupang telah mengikuti pola jejaring kerja yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan sistem hierarkis dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Struktur ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

PPKBD berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB di masyarakat, dengan pembina utama adalah kepala kelurahan, sementara ketua atau koordinator PPKBD umumnya berasal dari tokoh masyarakat atau pengurus Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan. Koordinator PPKBD bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh Sub-PPKBD serta memastikan bahwa seluruh kegiatan Program Bangga Kencana dapat dilaksanakan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik memperkuat efektivitas kerja kader KB dalam menggerakkan masyarakat serta mengawal pencapaian target program KB.

Dari perspektif teori organisasi, struktur yang jelas dan pembagian peran yang tepat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Dalam konteks KB, pengorganisasian yang kuat memungkinkan kader untuk lebih fokus pada fungsi penggerakan, pendampingan, dan pengawasan terhadap capaian peserta KB aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan praktik di tingkat akar rumput.

Peran Pertemuan dalam Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Program KB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertemuan rutin menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan Program KB di Kota Kupang. Pertemuan yang dilakukan oleh PPKBD meliputi pertemuan internal tim pelaksana, pertemuan dengan pihak eksternal atau sasaran program, serta pertemuan dengan para pemangku kepentingan seperti PLKB, bidan, dan aparat kelurahan.

Pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan bersama PLKB dan bidan berfungsi sebagai forum koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan, mengevaluasi capaian bulan sebelumnya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Melalui pertemuan ini, informasi terkait target peserta KB, jadwal pelayanan, serta strategi sosialisasi dapat disepakati secara bersama-sama. Temuan ini menunjukkan bahwa pertemuan berfungsi sebagai sarana sinkronisasi langkah antara kader, tenaga kesehatan, dan pemerintah kelurahan.

Secara konseptual, pertemuan rutin mencerminkan prinsip governance kolaboratif, di mana keberhasilan program publik sangat bergantung pada komunikasi yang intensif dan kerja sama lintas sektor. Tanpa pertemuan yang terstruktur, pelaksanaan program cenderung berjalan parsial dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, intensitas dan kualitas pertemuan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja IMP/Sub-IMP dalam mendukung program KB.

Peran KIE dan Konseling dalam Perubahan Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta konseling merupakan layanan inti yang secara langsung menyasar perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait keluarga berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPKBD secara aktif melaksanakan kegiatan KIE melalui penyuluhan kelompok, penyebaran media informasi seperti leaflet dan poster, serta diskusi informal dengan pasangan usia subur (PUS).

Kegiatan KIE berfungsi untuk menyampaikan informasi yang benar dan komprehensif mengenai manfaat program KB, jenis-jenis alat kontrasepsi, serta dampak positif pengaturan kelahiran terhadap kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, konseling dilakukan secara individual maupun kelompok untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat sesuai kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mereka.

Pembahasan hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara KIE dan konseling sangat efektif dalam mengatasi berbagai mitos dan kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). KIE membangun kesadaran umum, sedangkan konseling memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan kekhawatiran personal dan memperoleh solusi yang lebih spesifik. Dengan demikian, peran KIE dan konseling menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan penggunaan KB di masyarakat.

Peran Pencatatan dan Pendataan dalam Monitoring dan Evaluasi Program KB

Pencatatan dan pendataan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan program KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPKBD bersama PLKB secara rutin melakukan pendataan dan pencatatan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang mencakup data profil sasaran, jumlah peserta KB baru, jenis metode kontrasepsi yang digunakan, serta tingkat keberlanjutan peserta KB aktif.

Data SIGA digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi capaian program, sekaligus sebagai bahan perencanaan kegiatan selanjutnya. Pendataan yang sistematis memungkinkan identifikasi wilayah dengan capaian rendah, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah. Dari sudut pandang manajemen program, pencatatan yang akurat meningkatkan akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making).

Peran Pelayanan Kegiatan dalam Meningkatkan Akses dan Pemanfaatan KB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPKBD berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Peran ini meliputi sosialisasi jadwal pelayanan KB, fasilitasi pelayanan ulang alat kontrasepsi, serta rujukan ke puskesmas, klinik KB, atau rumah sakit untuk pelayanan yang memerlukan tindakan medis lanjutan.

Melalui peran ini, hambatan akses geografis dan informasi dapat diminimalkan. Masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan layanan KB yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh kemampuan institusi lokal dalam menggerakkan dan mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Peran IMP/Sub-IMP dalam Mendorong Kemandirian Masyarakat

Kemandirian merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendampingan berkelanjutan, masyarakat mulai menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri terkait penggunaan kontrasepsi, pengaturan jarak kelahiran, serta perencanaan keluarga.

Dalam konteks ini, peran PPKBD tidak lagi bersifat instruktif, tetapi fasilitatif. Masyarakat didorong untuk memahami hak dan tanggung jawabnya dalam perencanaan keluarga, sehingga ketergantungan terhadap intervensi eksternal dapat dikurangi. Temuan ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian sebagai indikator keberhasilan program.

Analisis Peningkatan Capaian Peserta KB

Berdasarkan data SIGA, jumlah peserta KB baru menunjukkan fluktuasi selama periode 2023-2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.551 peserta KB baru, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 5.856 peserta pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja program KB, yang didukung oleh intensifikasi sosialisasi, peningkatan akses layanan, serta ketersediaan metode kontrasepsi yang lebih beragam.

Namun, pada tahun 2025 jumlah peserta KB baru menurun menjadi 4.039 peserta hingga bulan November. Penurunan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati, mengingat data belum mencerminkan satu tahun penuh. Selain itu, faktor musiman, perubahan strategi program, serta isu kesehatan dan sosial dapat memengaruhi partisipasi masyarakat.

Preferensi masyarakat terhadap metode kontrasepsi menunjukkan bahwa implan dan suntikan masih menjadi pilihan utama, sementara vasektomi tetap menjadi metode yang paling kurang diminati. Kesenjangan antara tubektomi dan vasektomi mencerminkan rendahnya partisipasi pria dalam program KB, yang dipengaruhi oleh norma sosial dan kurangnya pemahaman mengenai kontrasepsi pria.

Kendala dan Upaya Penguatan Peran IMP/Sub-IMP

Hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi kader IMP, antara lain keterbatasan sarana prasarana, dukungan logistik yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan dukungan logistik, serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan institusi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di komunitas nelayan Oesapa Oleh berhasil menumbuhkan model gerakan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian ekonomi. Pendampingan berbasis partisipatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan literasi keuangan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, kesadaran ekologis, serta kemampuan organisasi komunitas. Munculnya kelompok usaha bersama, tokoh lokal baru, dan pranata sosial kolektif menunjukkan adanya transformasi sosial yang nyata, di mana masyarakat nelayan menjadi subjek aktif dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri. Secara keseluruhan, program ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial berbasis mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif, memberdayakan masyarakat lokal, dan menciptakan sistem ekonomi pesisir yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2001). *Statistik program keluarga berencana nasional*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Strategi peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2000). *Buku pedoman pelayanan keluarga berencana*. Jakarta: Depkes RI.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang. (2022). *Laporan tahunan program keluarga berencana Kota Kupang*. Kupang: DPPKB Kota Kupang.
- Jehamat, L., Nahak, I., & Khairunnisa. (2024). Penguatan kapasitas kader institusi masyarakat perkotaan untuk meningkatkan capaian KB. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Publik*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- World Health Organization. (2019). *Family planning: A global handbook for providers*. Geneva: WHO.
- Yanti, R. (2020). Hambatan sosial budaya dalam pelaksanaan program KB di wilayah perkotaan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 14(1), 33-47.